

ABSTRAK

Dwi Fitri Destiana “Pelayanan Kepemilikan E-KTP Pada Masyarakat Suku Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak”

E-KTP merupakan identitas yang resmi bagi warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum dan berlaku diseluruh wilayah Negara Indonesia. Kepemilikan E-KTP diatur dalam UU No 23 Tahun 2006 pasal 63 ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan. Faktanya, hanya sedikit masyarakat suku Baduy yang memahami pentingnya memiliki e-KTP. 40% Masyarakat suku Baduy yang sudah wajib KTP tidak memiliki e-KTP karena menganggap e-KTP tidak penting dalam kehidupan sehari-hari. Sarana Prasarana yang tidak memadai menjadi salah satu faktor tidak optimalnya pelayanan e-KTP di kantor Desa Kanekes. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan E-KTP pada masyarakat suku Baduy di kantor Desa Kanekes, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam meningkatkan kepemilikan e-KTP pada masyarakat suku Baduy. Peneliti menggunakan teori e-service menurut Khosrow Pour (2012) yaitu sistem, informasi, layanan, dan feedback. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data penelitian berdasarkan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2022) terdapat beberapa tahap yaitu 1) Pengumpulan data; 2) Reduksi data; 3) Penyajian data; 4) Menarik kesimpulan atau verifikasi data. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi pengumpulan data dan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan e-KTP pada masyarakat suku Baduy sudah meningkat, namun masih terdapat kendala dalam pembuatan e-KTP. Hal tersebut terjadi karena terdapat beberapa kendala seperti 1) Masih adanya kendala dalam proses penginputan data; 2) Terdapat masyarakat yang belum mendapatkan informasi mengenai e-KTP; 3) Masih belum lengkapnya sarana dan prasarana pembuatan e-KTP yang ada di kantor desa Kanekes; 4) Ketidaktepatan waktu dalam proses pembuatan e-KTP. Kemudian faktor penghambat dari peningkatannya kepemilikan e-KTP dipengaruhi oleh masyarakat Baduy yang kurang memahami pentingnya memiliki e-KTP dan kurangnya peran pemerintah pusat terhadap sarana dan prasarana yang ada di kantor desa Kanekes.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, e-KTP, Suku Baduy

ABSTRACT

Dwi Fitri Destiana "E-KTP Ownership Services for the Baduy Tribe Community in Kanekes Village, Lebak Regency"

E-KTP is an official identity for citizens issued by law enforcement agencies and is valid throughout the territory of Indonesia. Ownership of an E-KTP is regulated in Law No. 23 of 2006 article 63 paragraph 1 concerning Population Administration. In fact, only a few Baduy people understand the importance of having an e-KTP. 40% of Baduy people who are required to have an ID card do not have an e-KTP because they consider an e-KTP to be unimportant in their daily lives. Inadequate infrastructure is also one of the factors that e-KTP services are not optimal at the Kanekes Village office. This research aims to identify the government's role in increasing E-KTP ownership among Baduy tribal communities at the Kanekes Village office, as well as to determine the inhibiting factors in increasing e-KTP ownership among Baduy tribal communities. Researchers use e-service theory according to Khosrow Pour (2012), namely systems, information, services and feedback. This research uses a research method with a descriptive qualitative approach. Research data collection is based on observation, interviews and documentation studies. According to Sugiyono (2022), the data analysis technique used is in several stages, namely 1) Data collection; 2) Data reduction; 3) Presentation of data; 4) Draw conclusions or verify data. The data validity techniques used are data collection triangulation and source triangulation. Based on the results of research that has been carried out, it can be concluded that ownership of e-KTPs among the Baduy tribe has increased, but there are still obstacles in making e-KTPs. This happens because there are several obstacles such as 1) There are still obstacles in the data input process; 2) There are people who have not received information about e-KTP; 3) There are still incomplete facilities and infrastructure for making e-KTP at the Kanekes village office; 4) Inaccuracy in the process of making e-KTP. Then the inhibiting factors in increasing e-KTP ownership are influenced by the Baduy people who do not understand the importance of having an e-KTP and the lack of role of the central government in the facilities and infrastructure at the Kanekes village office.

Keywords: Government Role, e-KTP, Baduy Tribe